Jurnal Sejarah Indonesia
ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564)
Volume 9 Nomor 2 2026
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi

Tentang Kreativitas yang Dijinakkan: Pengikisan Kebudayaan Progresif di Indonesia Pasca Peristiwa 1965

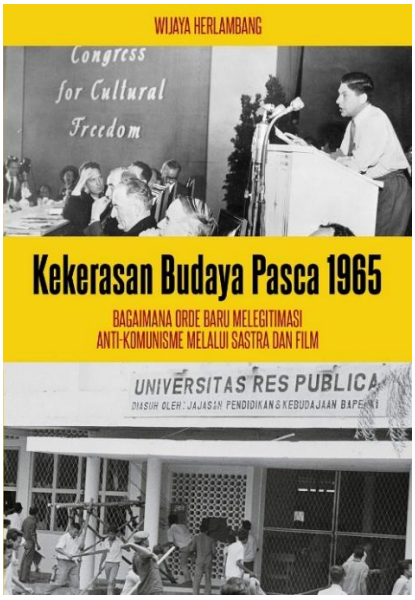
Muhammad Tristan Shah Jahan

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Email: andititan93@gmail.com

*Korespondensi

Received: 23-04-2026, Revised: 03-11-2026, Accepted: 04-11-2026, Published: 30-11-2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Judul Buku:
Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film
Penulis:
Wijaya Herlambang
Penerbit:
Marjin Kiri
Tebal:
xiv + 334 hlm
Tahun Terbit:
Januari 2026 (Cetakan Kesembilan)
ISBN:
978-979-1260-43-5

Selayang Pandang

Kekerasan Massal 1965-1966 yang dilakukan kelompok militer dengan para pedukungnya terhadap kelompok-kelompok yang diindikasi satu haluan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Presiden Sukarno, tidak berhenti pada pada pembantaian fisik dan aksi represif langsung lainnya. Melainkan juga berlanjut menyusup secara samar, sistematis dan berefek jangka panjang melalui produk-produk kebudayaan. Wijaya Herlambang dalam bukunya, *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film* (2026), menguraikan upaya Rezim Orde Baru membenarkan tindakan represifnya selama 1965-1966 dengan menggunakan produk kebudayaan (sastra dan film). Di samping itu, terdapat dukungan agen-agen kebudayaan yang didekingi Congress for Cultural Freedom (CCF)—organisasi kebudayaan di bawah naungan dinas intelijen Amerika Serikat—untuk membenamkan aktivitas kebudayaan progresif di Indonesia.

Akar pertentangan dalam panggung kebudayaan di Indonesia tidak terlepas dengan kondisi global pada dekade 1950an dan 1960an yang tengah diliputi oleh perang dingin antara Blok Barat yang diwakili Amerika Serikat dengan Blok Timur yang diwakili Uni Soviet. Selain nuklir dan intelijen yang umum merepresentasikan dinamika perang dingin, persaingan kebudayaan juga turut dalam sorotan kedua blok kekuatan tersebut. Seperti yang dijelaskan Saunders (2000) bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet menggunakan produk budaya seperti teater, film, resital musik, bahan bacaan, forum akademik dan pameran seni, untuk saling balas-membalas propaganda perang di antara kedua negara tersebut. Hingga Saunders menyebutnya sebagai "perang dingin kebudayaan", untuk menggambarkan bagaimana produk-produk kebudayaan kemudian digunakan sebagai alat propaganda kedua negara adidaya tersebut yang saling bersaing secara politik, ekonomi dan ideologi.

Buku Wijaya Herlambang kemudian menjawab lebih mendalam panjangnya "perang dingin kebudayaan"dalam ruang lingkup panggung kebudayaan Indonesia yang kala itu tengah bergiat melakukan pencarian atas identitas kebudayaan pasca-kemerdekaan. Titik awal yang menjadi diskursus dalam bukunya adalah pergulatan politik-ideologis pengusung haluan kebudayaan humanisme-universal dengan pengusung haluan kebudayaan realisme sosialis di tahun 1950an hingga 1960an. Hingga berlanjut ketika meletusnya perisitwa G30S 1965 dan kelompok militer melakukan kekerasan massal terhadap generasi kiri di Indonesia dan pengusung realisme juga terseret menjadi korban kekerasan massal. Para pengusung haluan humanisme-universal mendukung tindakan tersebut dengan melalui penciptaan produk-produk budaya seperti sastra, film dan medium kesenian lainnya untuk membabat habis eksistensi kebudayaan progresif di Indonesia. Proses yang disebut "kekerasan budaya" tersebut mewariskan ingatan kolektif masyarakat untuk membenarkan kekerasan massal 1965-1966 dan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan atas proses kekerasan massal tersebut.

Dalam kerangka kekerasan budaya, Rupensinghe dan Rubio (1994) menguraikan bahwa kekerasan budaya memiliki hubungan erat dengan kekerasan struktural karena kekerasan struktural berkelindan dengan tata sosial, ekonomi, budaya dan ideologi. Demikian kekerasan struktural sejatinya bagian yang termasuk ke dalam persoalan ideologi dan budaya. Kebudayaan tidak berdiri sebagai ruang berekspresi melainkan arena perebutan hegemoni politik dan kebudayaan. Peran negara dalam menegosiasikan, mengontrol dan menormalisasi kejahatan-kejahatan yang dilakukannya selama 1965-1966 secara tidak langsung menegaskan bahwa kekerasan budaya merupakan bagian sistematis dari kekerasan struktural. Perbedaan antara kekerasan langsung, struktural, dan kultural dapat dibaca berdampingan dengan kerangka awal Galtung (1969). Kajian sejarah tentang kekerasan 1965–1966 juga telah memperlihatkan variasi regional dan mekanisme represi yang tidak dapat direduksi menjadi satu pola tunggal (Cribb, 1990; Kammen & McGregor, 2012; Robinson, 2018).

Hasil Tinjauan Buku

"Tahun 1966 sastra Indonesia bangkit kembali, ditandai dengan terbitnya Majalah Horison pada bulan Juni 1966. Dalam catatan kebudayaan pertamanya yang ditulis Mochtar Lubis disebutkan bahwa majalah ini membuka lebar-lebar pluralisme.

Dan betul. Lewat majalah inilah sastra Indonesia bermunculan dan diciptakan kembali dengan macam gaya, eksperimen, thema dan pokok masalahnya. Sebuah sastra yang tidak hanya diciptakan untuk memenuhi hasrat golongan tertentu yang berkuasa, seperti di jaman PKI dan Lekra-nya, melainkan sastra untuk semua golongan masyarakat, sastra yang mencerminkan kemajemukan" (Horison, 1982).

Ada suatu ungkapan berbahasa Prancis, berbunyi "*l'art pour l'art*" atau terjemahannya adalah "Seni untuk seni". Ungkapan tersebut pertama kali berkembang di Prancis di pertengahan abad ke-19 tepatnya ketika berkembangnya gerakan sastra *avant-garde,* yang intinya ungkapan tersebut untuk menjelaskan bahwa seni yang tidak berpihak, estetika yang murni, bebas dan tidak merujuk pada suatu kepentingan (Wilcox, 1953). Demikian Abdul Hadi Wiji Muthari (1982). dalam tulisannya di atas memuat keterangan yang jelas bahwa kemudian kebudayaan humanisme-universal yang juga mengkiblatkan pada ungkapan "*l'art pour l'art*" telah membangkitkan kembali geliat sastra Indonesia dari jerat politik-propaganda seperti sastra yang dikembangkan oleh Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) sebagai basis kebudayaan kiri-progresif di Indonesia. Pada akhirnya sastra kembali menjadi medium ekspresi, manifestasi ide-gagasan dan merealisasikan diri.

Pengembalian paradigma yang sukses dilakukan para penganut humanisme-universal ini merupakan puncak dari pertentangan kebudayaan selama kurang lebih dua dekade dalam panggung kebudayaan Indonesia. Wijaya Herlambang dalam bukunya telah memetakan akar pertentangan kebudayaan antara kebudayaan humanisme-universal dan kebudayaan realisme sosialis secara luas dan mendalam, bahkan melintasi ruang lingkup pengaruh politik global era Perang Dingin hingga proses pencarian jati diri kebudayaan Indonesia yang sudah digali bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jalinan kontak politik-kebudayaan antara Amerika Serikat via CCF dengan para int elektual maupun sastrawan di Indonesia sejak awal-awal tahun 1950an membuka arus liberalisasi di dalam panggung kebudayaan Indonesia. Bentuk kesiagaan Amerika Serikat terhadap ekspansi komunisme di Asia Tenggara yang mengharuskan dilangsungkannya penyusupan kebudayaan melalui bantuan dana keuangan bagi beasiswa pendidikan seperti yang dilakukan *Ford Foundation* dan *Rockefeller Foundation*, penerbitan/distribusi buku, dan pengenalan corak-corak seni ala Barat di dalam corak seni Indonesia.

Amerika Serikat lewat *broker* kebudayaannya di Indonesia seperti Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisjahbana, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito, Rosihan Anwar dan P. K. Ojong sukses mengontrol gerak kebudayaan Indonesia menuju arah humanisme-unvieersal. Namun demikian bukan hal yang mudah karena harus berhadapan dengan Lekra dengan semangat realisme sosialisnya. Lekra menjadikan kerja kebudayaan berbasis politik sebagai panglima agar karya seni yang dihasilkan bermuatan politik dan propaganda, serta disamping itu juga Lekra membawa semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) untuk menentang bentuk neo-imperialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet (Nasirin & Abdurakhman, 2024). Pada era Demokrasi Terpimpin, pertentangan kebudayaaan humanisme-universal dan realisme sosialis semakin mencuat. Kelompok Manifesto Kebudayaan mewakili kebudayaan humanisme-universal yang digagas oleh HB Jassin, Arief Budiman, Taufiq Ismail, dan tokoh lainnya, paling mendapatkan serangan dari Lekra dan pemerintah Demokrasi Terpimpin. Pembredelan, pemenjaraan, pembatasan hingga puncaknya kelompok Manifesto Kebudayaan dinyatakan terlarang oleh Presiden

Sukarno pada 8 Mei 1964 karena dianggap menyaingi manifesto politik Indonesia. (Susanti et al., 2019). Namun keadaan tersebut tidak bertahan lama, sampai pada krisis politik 1965-1966 membalikkan keadaan gelanggang kebudayaan Indonesia. Penelitian Woolgar (2020) tentang Lekra di Jawa Barat memperlihatkan bahwa dinamika kebudayaan tidak selalu mengikuti pembelahan tegas antara Lekra dan Manifesto Kebudayaan. Para sastrawan Sunda dan jaringan kebudayaan daerah memiliki pilihan, negosiasi, dan perdebatan tersendiri. Temuan ini melengkapi pembacaan Herlambang dengan menggeser perhatian dari elite Jakarta menuju pengalaman aktor kebudayaan di daerah.

Tragedi G30S 1965 menjadi pukulan telak Lekra dan segala bentuk aktivitas kebudayaan progresif di Indonesia. Seiring faksi militer di bawah komando Jenderal Soeharto yang didekingi Amerika Serikat melakukan kekerasan massal terhadap mereka yang tertuduh komunis dan terafiliasi PKI dalam G30S, kelompok Lekra dan para pendukung kebudayaan realisme sosialis juga tak luput dari aksi kekerasan. Karena Lekra dituduh mendukung G30S melalui seni, misal seperti yang dijelaskan Wierenga dan Katjasungkana (2020) bahwa militer menuduh Lekra dengan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menggunakan lagu "Genjer-Genjer" karya M. Arief ketika melatih para anggota Gerwani untuk menyiksa dan membunuh para perwira korban G30S. Lekra dibubarkan, para pegiat di dalamnya ditangkap, realisme-sosialis semakin meredup eksistensinya. Lebih dalam, Wijaya Herlambang menjelaskan bentuk-bentuk pengikisan aktivitas kebudayaan progresif Indonesia oleh Negara dan para pengusung haluan humanisme-universal pasca-1965. Roosa (2016) mengingatkan bahwa pembunuhan dan penghilangan massal 1965–1966 merupakan rahasia umum yang pengetahuannya tersebar tidak merata, sementara pengakuan dan pembungkaman bekerja secara bersamaan. Oleh sebab itu, pembacaan produk kebudayaan antikomunis perlu ditempatkan dalam hubungan antara kekerasan fisik, pengaturan pengetahuan publik, dan produksi ingatan.

Wijaya Herlambang menjelaskan bagaimana bentuk legitimasi antikomunisme dan gerakan membendung eksistensi kebudayaan progresif di Indonesia pasca-1965 dilakukan lewat penulisan dan pembacaan karya sastra serta seni visual di layar sinema. Hal tersebut diefektifkan Rezim Orde Baru dan para seniman-seniman pendukungnya untuk meligitimasi pembenaran atas kekerasan massal 1965-1966 serta bentuk pengembangan liberalisasi kebudayaan di Indonesia. Peninjauan atas teks-teks sastra antikomunis bisa dijumpai di majalah *Horison*—oleh penggalan tulisan Abdul Hadi W. M. di atas dikatakan bahwa didirikannya *Horison* menjadi titik balik kebangkitan kembali sastra Indonesia—yang memuat cerpen, puisi, prosa, opini dan kolom. Misal seperti cerpen karya Satyagraha Hoerip bertajuk "*Pada Titik Kulminasi"* (Horison, 1966) yang menceritakan tokoh Soes dan Wimbadi sebagai aktivis antikomunis yang percaya bahwa untuk menyelamatkan agama dan prinsip humanisme-universal adalah dengan cara membunuh kaum komunis, hingga akhirnya Soes membunuh saudara iparnya yang komunis. Bentuk pembenaran atas tindakan antikomunis melalui teks semacam hal tersebut oleh Wijaya Herlambang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan budaya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan dapat dibentuk melalui representasi teks dan simbol. Menurut Galtung (1990) bahwa aspek-aspek budaya dan simbol dalam lingkup kehidupan sehari-hari seperti agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu

empiris, ilmu formal (seperti logika dan matematika), dapat difungsikan menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Pembenaran lain atas kekerasan massal 1965-1966 dan demonisasi PKI serta eksistensi komunisme di Indonesia dapat dijumpai juga dalam film "*Pengkhianatan G30S/PKI*" yang diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dan disutradarai oleh Arifin C. Noer, kemudian dialihwahanakan sebagai novel oleh Arswendo Atmowiloto dengan judul yang sama. Film tersebut menyajikan memorabilia bagi generasi-generasi Indonesia sejak 1980an hingga kini, karena film tersebut menyuguhkan adegan, musik, efek visual, pengambilan kamera, dan intepretasi narasi untuk membangkitkan memori kolektif publik agar kebencian terhadap PKI dan komunisme tetap utuh, terpatri dan terperenialisasi. Kajian McGregor (2002) tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila menunjukkan pentingnya ritual peringatan resmi dalam pemeliharaan penafsiran negara atas 1965. Dengan demikian, film propaganda perlu dibaca bersama institusi pendidikan, peringatan, dan praktik kenegaraan lain yang mengulang narasi sejarah.

Salah satu kasus yang dijabarkan Wijaya Herlambang yang dapat diidentifikasi merupakan bagian dari pengikisan kebudayaan progresif ialah dalam kasus Pramoedya Ananta Toer. Selain karya Tetralogi Buru-nya yang sempat dibredel negara karena dianggap subversif, Pramoedya mendapat penghargaan Magsaysay pada 1995 mendapat penolakan dari beberapa tokoh antikomunis seperti Mochtar Lubis, Wiratmo Soekito, Taufiq Ismail dan Goenawan Mohammad. Hal tersebut mendapatkan pembelaan dari Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker)—lembaga kebudayaan di bawah Persatuan (Partai) Rakyat Demokratik (PRD) yang diorganisir oleh penyair Wiji Thukul—karena Pramoedya sendiri merupakan anggota kehormatan dari PRD, ia mendapatkan dukungan dari aktivis PRD seperti Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, Petrus Haryanto dan tentunya Wiji Thukul. Terkait Jaker yang mendukung Pramoedya, dikarenakan Jaker membangkitkan kembali eksistensi kebudayaan realisme sosialis yang pernah dibawakan oleh Lekra (Nurhakiki, 2015). Dalam kajiannya mengenai ingatan korban penyiksaan dan sejarah negara, Roosa (2008) memperlihatkan ketegangan antara kesaksian penyintas dan versi resmi masa lalu. Hal ini relevan bagi evaluasi narasi film dan sastra yang dibahas Herlambang: representasi yang dominan dapat membatasi keterlihatan pengalaman korban.

Kali ini Jaker dengan karya-karyanya lebih radikal dan aktual, menyoroti kesenjangan sosial-ekonomi akibat kapitalisme, militerisme, korupsi, degradasi moral, dan lain-lain, yang keseluruhan karyanya dialamatkan kepada Rezim Orde Baru sebagai biang segala persoalan di setiap lapisan masyarakat. Keberadaan Jaker dan PRD menjadi harapan bangkitnya kembali aktivitas kebudayaan progresif di Indonesia. Namun keadaan berubah ketika Persitiwa 27 Juli 1996, konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menyebabkan beberapa aktivis PRD ditangkap karena dituduh menggerakan aksi kerusuhan dan aktivis-aktivis lain harus bergerak dalam jaringan bawah tanah. Aktivitas kebudayaan Jaker pun ikut melesu seiring terhentunya aktivitas politik PRD. Sempat didirikan media *Suluh Pembebasan* oleh Wiji Thukul namun tidak bertahan lama karena pada 10 Februari 1998 ia dikabarkan menghilang dengan dugaan menjadi korban penculikan aktivis demokrasi oleh sekelompok tentara. Pembacaan terhadap perlawanan kebudayaan

pasca-1965 juga dapat diletakkan dalam konteks panjang perubahan rezim dan produksi sejarah resmi (McGregor, 2007; Roosa, 2006).

Dari serangkaian peristiwa tersebut, menjadi kali kedua aktivitas kebudayaan progresif di Indonesia mengalami kemunduran. Namun di sisi lain, berkembang lembaga-lembaga kebudayaan yang membawa semangat neoliberalisme budaya dan ekonomi. Wijaya Herlambang menyebut Komunitas Utan Kayu (KUK) yang didirikan oleh Goenawan Mohammad pada 1997 sebagai "imperium kebudayaan" karena ia menjadi institusi kebudayaan dan intelektual kontemporer di Indonesia terbesar dan aktif secara gradual. Menurut Maier (2004), pengaruh KUK dibesarkan oleh keaktifannya dalam menggelar festival budaya, forum diskusi, pertunjukan teater, pameran seni, penayangan film, pagelaran sastra, penerbitan buku dan jurnal, serta memperluas sayap publikasi tulisan aktivis-aktivis KUK yang dimuat di beberapa media berita.

Wijaya Herlambang menjelaskan juga pasang-surut hubungan KUK dengan Freedom Institute yang didirikan oleh Rizal Mallarangeng dan Aburizal Bakrie. Kedua institusi tersebut terlibat dalam konstelasi politik dan ekonomi Indonesia. Pasang-surut keduanya terlihat ketika menjelang Pemilihan Presiden 2009, ketika KUK dan Freedom Institute menjembatani hubungan politik antara Aburizal Bakrie dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Bakrie bisa mendapatkan posisi yang aman pasca-kasus banjir lumpur panas Lapindo pada 2006. Goenawan Mohammad pun melalui "Catatan Pinggir"-nya membuat semacam kontra narasi publik mengenai calon wakil presiden, Boediono yang dituduh publik sebagai neoliberal yang berpihak pada ekonomi pasar bebas. Kendati demikian hubungan KUK dan Freedom Institute merenggang ketika mencuat kasus Bank Century yang membawa pertentangan sengit antara Aburizal Bakrie dengan Sri Mulyani.

Pada kesempatan ini, bangkit kembali gelombang aktivitas kebudayaan progresif di Indonesia. Kritik terhadap aktivitas kebudayaan KUK datang dari Taufiq Ismail yang dulu satu haluan dengan Goenawan Mohammad, namun kini ia bersebrangan karena Taufiq menilai KUK membawa perkembangan kesusastraan Indonesia yang vulgar dan mendegradasi moral, terlebih lagi Taufiq menyayangkan aktivitas ini disponsori oleh asing. Kritik juga datang dari forum Ode Kampung yang diorganisasikan oleh Wowok Hesti Prabowo (tokoh Komunitas Sastra Indonesia) dan Saut Situmorang dengan menyatakan sikap, yakni: 1). Menolak dominasi dan arogansi sebuah komunitas sastra atas komunitas sastra lainnya, 2). Menolak eksploitasi seksual sebagai standar estetika, 3). Menolak bantuan asing yang memperalat keindonesiaan kebudayaan kita (Indonesia Literary Community, 2007 September 7). Kritik atas aktivitas kebudayaan KUK menjadi bentuk keresahan sekaligus perlawanan budaya kontemporer Indonesia terhadap dominasi wacana budaya Barat yang mempengaruhi corak sastra Indonesia pasca-Orde Baru. McGregor (2009) menunjukkan bahwa pembahasan kembali kekerasan 1965–1966 setelah Orde Baru melibatkan perdebatan internal masyarakat dan organisasi keagamaan. Perspektif ini mengingatkan bahwa ingatan antikomunisme bukan konstruksi yang sepenuhnya tetap: ia dipertahankan, dipersoalkan, dan dinegosiasikan oleh kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Kesimpulan

Pertarungan kebudayaan humanisme-universal dengan realisme sosialis dalam gelanggang kebudayaan Indonesia tidak sekedar mempertengahkan persoalan estetika, namun membentangkan secara luas horison yang membentuk kontektivitas antara dinamika global yang berkembang pada era perang dingin, konstelasi di antara kelompok-kelompok politik yang berkuasa di Indonesia, dengan pencarian identitas kebudayaan negara pasca-kemerdekaan. Dalam keterkaitan tersebut, buku Wijaya Herlambang secara tersirat menentang anggapan sifat kebudayaan yang netral atau otonom dari persoalan politik. Justru sebaliknya, terbuka suatu arena untuk mempertentangkan ideologi, makna, ingatan kolektif, serta produksi identitas dan pengetahuan. Perspektif tentang konstruksi komunitas dan identitas kolektif (Anderson, 1991) membantu menjelaskan mengapa produksi kebudayaan dapat membentuk batas-batas keanggotaan politik dan imajinasi kebangsaan.

Kekerasan Massal 1965-1966 menjadi titik balik drastis. Penghancuran PKI dan Lekra oleh kelompok militer menjalar terhadap penghancuran basis dan aktivitas kebudayaan progresif di Indonesia. Kelompok militer sebagai pemenang konstelasi politik 1965-1966 bersama para seniman atau pekerja budaya yang berhaluan humanisme-universal, berupaya melanggengkan arus liberalisme dan membendung kerja-kerja kebudayaaan yang progresif. Maka negara berperan menjadi patron kebudayaan yang mengatur batas-batas estetika dan kreativitas untuk dibingkai ulang agar selaras dengan stabilitas dan wacana pembangunan yang anti-komunisme. Dalam konteks ini, kebudayaan menjadi medium efektif sebagai produksi ingatan kolektif masyarakat untuk membenarkan dan mewajarkan tragedi kekerasan massal 1965-1966 melalui sastra dan film.

Hubungan antara negara dengan seniman tidak digambarkan secara "hitam-putih". Seniman ditempatkan dalam spektrum yang sempit, ia bisa saja berkompromi atau menjadi korban represi. Bentuk penjinakkan yang ditampilkan dalam buku ini menunjukkan bahwa kepentingan politik-ekonomi terus berkelindan dalam aktivitas kebudayaan sehingga dengan mudah negara menentukan batas-batas estetika dan kreativitas antara yang selaras dengan kepentingan atau malah bertentangan. Buku ini lebih dari suatu kajian politik-kebudayaan, ini menjadi penanda tentang kerapuhan komitmen dalam berekspresi dan berkreasi di negara yang masih mencari identitas kebudayaanya karena terjebak dalam kontrol kekuasaan yang represif dan manipulatif. Kajian mengenai pengalaman penyintas di Jawa Timur mengingatkan bahwa penilaian terhadap narasi dominan perlu tetap membuka ruang bagi suara korban dan pengalaman lokal (Hearman, 2018).

Referensi

Anderson, B. R. O'G. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

Cribb, R. (Ed.). (1990). *The Indonesian killings of 1965–1966: Studies from Java and Bali. Centre of Southeast Asian Studies.* Monash University Press.

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research, 6*(3), 167–191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301.

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research, 27*(3), 291-305. https://doi.org/10.1177/0022343390027003005.

Hearman, V. (2018). *Unmarked graves: Death and survival in the anti-communist violence in East Java, Indonesia*. NUS Press.

Herlambang, W. (2026). *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Marjin Kiri.

Hoerip, S. (1966). *"Pada Titik Kulminasi". Dalam Horison No. 3/1966.* Yayasan Indonesia.

Indonesia Literary Community. (2007 September 7). *Ode Kampung Tolak Sastra 'Ngeseks' dan Imperialisme Budaya*. https://komunitassastra.wordpress.com/2007/09/07/ode-kampung-tolak-sastra-ngeseks-dan-imperialis-budaya/. Diakses pada 11 Februari 2026.

Kammen, D., & McGregor, K. E. (Eds.). (2012). *The contours of mass violence in Indonesia, 1965–68.* NUS Press.

Maier. (2004). *We Are Playing Relatives: A Survey of Malay Writing*. KITLV Press.

McGregor, K. E. (2002). Commemoration of 1 October, Hari Kesaktian Pancasila: A post-mortem analysis? *Asian Studies Review, 26*(1), 39–72. https://doi.org/10.1080/10357820208713330.

McGregor, K. E. (2007). *History in uniform: Military ideology and the construction of Indonesia's past.* NUS Press.

McGregor, K. E. (2009). Confronting the past in contemporary Indonesia: The anticommunist killings of 1965–66 and the role of the Nahdlatul Ulama. *Critical Asian Studies, 41*(2), 195–224. https://doi.org/10.1080/14672710902809351.

Muthari, A. H. W. (1982). Realisme Sosialis Dan Humanisme Universal: Sastra Indonesia 1959—1965. *Horison, 9.* Yayasan Indonesia.

Nasirin, A. A., & Abdurakhman, A. (2024). Telusur Eksistensi Nasakom dan Aktivitas Lekra masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 7*(1), 27–38. https://ejournal-social.upi.edu/historia/article/view/665.

Nurhakiki, D. A. Y. (2015). Potret buruh Indonesia pada masa orde baru dalam kumpulan puisi Nyanyian Akar Rumput karya Wiji Thukul dan implikasinya terhadap pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Robinson, G. B. (2018). *The killing season: A history of the Indonesian massacres, 1965–66.* Princeton University Press.

Roosa, J. (2006). *Pretext for mass murder: The September 30th Movement and Suharto's coup d'état in Indonesia.* University of Wisconsin Press.

Roosa, J. (2008). The truths of torture: Victims' memories and state histories in Indonesia. *Indonesia, 85,* 31–49. https://www.jstor.org/stable/40376443

Roosa, J. (2016). The state of knowledge about an open secret: Indonesia's mass disappearances of 1965–66. *The Journal of Asian Studies, 75*(2), 281–297. https://doi.org/10.1017/S0021911816000474.

Rupensighe, K. & Rubio C., M. (1994). *The Culture of Violence*. United Nations University Press.

Saunders, F. S. (2000). *The Cultural Cold War The CIA and the World of Arts and Letters*. The New Press.

Susanti, N., Supriatna, N., & Sumantri, Y. K. (2019). LEKRA VS MANIKEBU: Perlawanan Majalah Sastra terhadap Politik Kebudayaan Pemerintah Masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964). *Factum: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 8*(1), 87-112. https://ejournal-social.upi.edu/factum/article/view/164.

Wierenga, S. & Katjasungkana, N. (2020). *Propaganda & Genosida di Indonesia*. Komunitas Bambu.

Wilcox, J. (1953). The Beginnings of l'Art Pour l'Art. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 11*(4), 360–377. https://doi.org/10.2307/426457.

Woolgar, M. (2020). A "Cultural Cold War"?: Lekra, the left and the arts in West Java, Indonesia, 1951–65. *Indonesia and the Malay World, 48*(140), 97–115. https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1682316.